

# Mencari Jalan Keluar Dari Kemelut Ketenagakerjaan Di Indonesia Sebagai Dampak Dari Krisis Global

oleh : Zainal Mustafa EQ

## Pendahuluan

Ilmu ekonomi sumber daya manusia atau sering disebut dengan ekonomi ketenagakerjaan adalah pengetahuan tentang pekerjaan dan keluaran (*output*) di pasar tenaga kerja (Sumarsono, 2003). Secara khusus ilmu ekonomi tenaga kerja lebih menekankan pada tingkah laku pekerja (buruh) dan pimpinan (manajer) dalam pandangannya terhadap upah, insentif, tunjangan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan serta aspek-aspek lain yang tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja. Teori ekonomi sumber daya manusia merupakan suatu teori yang motivasinya adalah mengajak para ahli atau pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk bersama-sama mencermati dan memahami kondisi ketenagakerjaan yang sifatnya multidisipliner.

Mengacu pada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang berbeda-beda, misalnya buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Buruh merupakan istilah yang sangat populer dan bahkan sampai saat ini masih digunakan sebagai sebutan kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Pendapat lain mengatakan bahwa buruh diidentikan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah dan berpenghasilan rendah pula (Budiono, 1955). Bahkan pada masa penjajahan terdapat istilah yang lebih tidak bermatabat lagi, yaitu

kuli (koeli) yang pada hakekatnya diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya, meskipun disadari bahwa buruh/kuli keberadaannya sangatlah penting artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Istilah pekerja dalam praktik sering hanya digunakan untuk menunjukkan status hubungan kerja, misalnya pekerjaan kontrak, pekerja borongan, pekerja harian. Sebenarnya pekerja mempunyai pengertian yang sangat luas, diantaranya adalah orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun swa pekerja (pekerja mandiri). Istilah yang sejajar dengan pekerja adalah karyawan, dimana istilah karyawan sering digunakan untuk posisi yang berkaitan dengan ketatausahaan (administrasi). Karyawan atau pegawai lebih condong kepada jenis pekerjaan non fisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan yang disebut pegawai pada umumnya adalah setiap orang yang bekerja dipemerintahan. Istilah lain yang lebih luas pengertiannya adalah tenaga kerja.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam pengertian tersebut tidak menjelaskan

mengenai status hubungan kerjanya. Lebih jauh Halim (1990) telah memberikan pengertian buruh/pegawai, yaitu :

1. Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan
2. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan
3. Secara resmi terantangan dan kontinyu mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 ayat (6)).

Perihal pengertian majikan atau pengusaha menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan pekerja. Tetapi menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha adalah :

1. Orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang, persekutuan atau

badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sedang Rahmat (1991) berpendapat bahwa pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (*buseiness opportunities*) dan merealisasikannya dalam bentuk saran-saran yang harus dicapai.

Hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan, yang mengatur kepentingan orang perorangan, oleh karena itulah Hukum Ketenagakerjaan bersifat privat (perdata). Mengingat dalam pelaksanaan hubungan kerja tersebut sangat mungkin muncul berbagai permasalahan, maka diperlukan pihak ketiga, yaitu campur tangan pemerintah, karena itu Hukum Ketenagakerjaan juga bersifat publik. Terhadap hal itu, Budiono (1995) membagi Hukum Ketenagakerjaan menjadi dua kelompok, yakni :

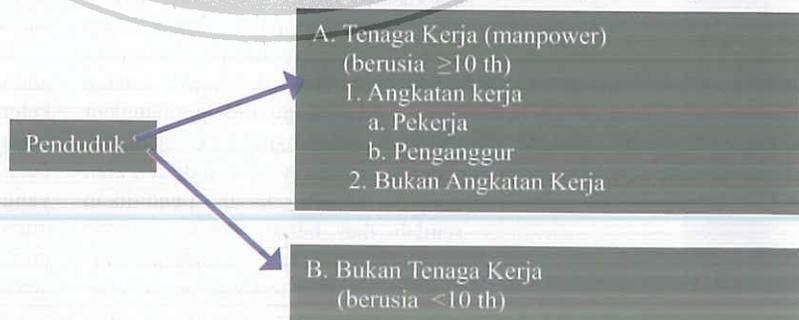
1. Hukum Ketenagakerjaan bersifat imperatif, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak dan tidak boleh dilanggar (misal Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing).
2. Hukum Ketenagakerjaan bersifat fakultatif (hukum yang melengkapi), artinya hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya (misal Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara/tempat pembayaran gaji bagi tenaga kerjanya).

Tenaga kerja (*man power*) dapat dipilah ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Angkatan kerja (*labor force*), yang meliputi tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun untuk sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu :
  - a. Pekerja, adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak bekerja.
  - b. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau sedang mencari pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja, meliputi tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tetapi mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan.

Penjelasan mengenai tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat divisualisasikan ke dalam gambar seperti berikut ini :

Gambar 1.  
Pemilahan Penduduk Dengan Pendekatan Angkatan Kerja



# Kondisi Umum Perekonomian Indonesia

## Kondisi Ketenagakerjaan

Belum lama ini Indonesia telah dilanda krisis ekonomi seperti halnya pada tahun 1998 yang lalu. Krisis Indonesia pada tahun 1998 yang lalu merupakan dampak dari krisis yang terjadi di Asia, sedangkan krisis Indonesia yang baru saja terjadi merupakan dampak dari krisis Amerika sebagai negara adi daya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya pidato kenegaraan, yaitu pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 15 Oktober 2008 di Gedung Utama Setneg ([setneg.go.id](http://setneg.go.id) dikutip oleh Purna, 2008).

Dampak langsung dari krisis kapitalisme Amerika terhadap kondisi perekonomian Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa aspek, misalnya dari perkembangan sektor moneter, sektor riil, volume cadangan devisa dan utang pemerintah serta bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Nilai kurs rupiah berangsur-angsur semakin terpuruk hingga mencapai nilai Rp 11.000,- per satu dolar AS, bahkan pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November 2008 nilai kurs rupiah sempat terpuruk hingga mencapai Rp 13.000,- per satu dolar AS.

Meskipun tanpa dukungan informasi yang akurat, dari berbagai media dapat dikemukakan bahwa harga ekspor beberapa komoditas primer Indonesia, misalnya harga minyak bumi yang sempat mencapai harga yang fantastis, yaitu US\$ 140 per barrel, sehingga pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM, meskipun pada akhir-akhir ini harga minyak dunia merosot secara drastis menjadi sekitar US\$ 35 per barrel. Hal serupa juga terjadi pada komoditas kopi, karet dan kakao.

Fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari adanya krisis ekonomi di Indonesia saat ini adalah meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja. Kembali dengan

hanya menyimak beberapa informasi dari berbagai media, dapat dijelaskan bahwa tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan mencapai angka sebesar 100.000 orang pekerja. Beberapa industri yang hasil produksi utamanya termasuk dalam komoditas utama yang berorientasi ekspor, termasuk di dalamnya adalah industri tekstil, industri kayu lapis dan industri sepatu pada akhir tahun 2008 ini merupakan industri yang sangat terawat dengan PHK bagi para karyawannya. Sebagai muara terakhir dari semua dampak dari krisis keuangan global di Indonesia adalah meningkatnya kemiskinan. Dari pengalaman selama ini, kita telah disadarkan oleh suatu kenyataan pahit, bahwa para investor industri seperti tersebut di atas yang paling suka melakukan pindah tempat usaha. Mereka mencari negara yang mempunyai jumlah buruh yang melimpah, upah yang relatif rendah dan mempunyai peraturan yang longgar. Sebagai contoh kita ambil data mengenai Angkatan Kerja, Pekerja dan Pengangguran selama tahun 2002 seperti yang tertera pada Tabel 1, dihalaman berikutnya.

Dari Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 2,69% saja sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan SMTP ke bawah sebanyak 76,54% (17,49% + 59,05%). Ini artinya sebagian besar angkatan kerja di Indonesia berpendidikan rendah yang bersedia bekerja dengan upah yang rendah. Menurut pengalaman, jenis sumber daya manusia seperti ini yang cocok untuk industri padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronik, rokok.

Tabel 1.  
Struktur Angkatan Kerja, Pekerja dan Pengangguran Terbuka  
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2002

No	Tingkat Pendidikan	Struktur Angkatan Kerja		Struktur Pekerja		Struktur Pengangguran Terbuka	
		(juta)	(%)	(juta)	(%)	(juta)	(%)
1	SD dan SD ke bawah	59,05	58,6	55,84	60,9	3,22	35,3
2	SMTP	17,49	17,4	15,43	16,7	2,15	23,5
3	SMU	12,21	12,1	10,07	11,0	2,14	23,4
4	SMK	7,12	7,1	6,02	6,6	1,11	12,2
5	Diploma/Akademi	2,21	2,2	1,96	2,1	0,25	2,7
6	Universitas	2,69	2,7	2,42	2,6	0,26	2,8
Jumlah	100,77	100,0	91,65	100,0	9,13	100,0	

Sumber: Silaban, 2003

Bagi investor industri tersebut, sangat senang dengan situasi seperti itu, meskipun para pengusaha harus memberi pelatihan, namun biaya pelatihan untuk kepentingan itu masih relatif lebih murah jika dibandingkan industri padat modal.

Pasca terjadinya reformasi sekitar tahun 1998, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan yang lebih mengarah ke demokratisasi, yaitu dengan membolehkan kembali adanya serikat pekerja, perundingan kerja bersama, larangan adanya kerja paksa, perlindungan anak terhadap pekerjaan, menghilangkan adanya diskriminasi kerja, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan masih banyak lagi yang nampaknya pemerintah memang akan melindungi buruh (pekerja) menuju kondisi kehidupan yang lebih sejahtera. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan apa yang ada dipikiran para pengusaha, khususnya

pengusaha tanpa kaki yang mudah sekali memindahkan investasi ke tempat lain. Mereka sangat khawatir, bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan itu akan diikuti dengan peraturan atau undang-undang baru yang bagi pengusaha akan merugikan (karena beban biaya yang ditanggung akan semakin tinggi). Pemerintah dalam hal ini memang dalam posisi yang sulit, terlebih untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dengan pengusaha.

Keberpihakan pemerintah pada pengusaha sering kali menjadi penyebab munculnya pemogokan kerja. Pemogokan kerja kadang memang dilakukan untuk menekan pemerintah agar mengganti suatu kebijakan agar pemerintah tetap berpihak pada tenaga kerja. Mogok kerja memang akan berakibat pada kerugian yang sangat besar, terutama apabila dilakukan oleh tenaga kerja pada industri yang mempunyai pengaruh besar pada masyarakat, misalnya industri padat karya dan pelayanan publik. namun demikian mogok kerja merupakan hak fundamental tenaga kerja untuk menyeimbangkan kedudukannya dengan pengusaha dalam hal

berunding dan mempertahankan hak-haknya, terlebih lagi Indonesia pasca reformasi telah meratifikasi konversi ILO yaitu adanya jaminan kepada tenaga kerja untuk melakukan mogok kerja. Sebagai contoh, pemogokan selama tahun 2001 – 2002, di PT Telkom, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) telah terjadi pemogokan yang intinya adalah agar direksi maupun pemerintah memperhatikan tuntutan karyawan. Beberapa BUMN yang dicontohkan tersebut merupakan perusahaan vital yang mempunyai hak monopoli, oleh karena itu pogokan tersebut akan berdampak pada kerugian yang sangat besar bagi BUMN itu sendiri dan masyarakat.

Apabila disimak lebih jauh, Penetapan Presiden (Penpres) No. 7 Tahun 1963 tentang larangan mogok kerja dan penutupan (*lock out*) bagi karyawan di perusahaan, jawatan dan badan vital milik negara sebenarnya masih berlaku hingga kini, oleh sebab itu pmogokan di perusahaan-perusahaan tersebut dianggap sebagai tindak kriminal (pidana). Hal ini ditegaskan oleh Uwiyono (2001), yang menyatakan bahwa keberadaan Penpres No. 7 Tahun

1963 menggantung.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan mogok kerja sebenarnya sangat merugikan, untuk perusahaan yang manapun, namun disatu sisi pemogokan kerja digunakan sebagai penyeimbang posisi tawar bagi tenaga kerja, dilematis memang! jadi persoalannya adalah, bagaimana karyawan menggunakan hak mogoknya tersebut dengan cara yang lebih profesional, tidak anarkis, tidak membabi buta sehingga hak mogok itu hanya dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya damai yang sudah dilakukan tidak menunjukkan hasil.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa ciri dari hubungan kerja diantaranya adalah adanya upah, adanya pekerjaan dan adanya perintah dari perusahaan kepada karyawan. Jadi pertanggung jawaban atas kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat karena adanya pemogokan kerja di suatu perusahaan, maka pihak perusahaanlah yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Sebagai contoh pemogokan yang

pernah dilakukan di PT. Telkom yang notabene PT. Telkom merupakan sebuah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada publik, dampaknya adalah banyak masyarakat yang merasa tidak dapat terlayani dengan baik, masyarakat merasa dirugikan dengan aksi mogok tersebut. Hal ini tentu akan memberikan citra buruk pada pelayanan PT. Telkom.

Setelah melalui perjalanan yang panjang, tanggal 1 Mei dijadikan sebagai Hari Buruh sedunia "May Day", buruh, karyawan tenaga kerja hampir seluruh propinsi di Indonesia selalu merayakan hari buruh tersebut, meskipun dengan cara melakukan demonstrasi (unjuk rasa). Menurut beberapa media cetak dan elektronik, Hari Buruh sedunia pada tahun 2006, salah satunya dirayakan di Jakarta dengan unjuk rasa oleh puluhan ribu buruh yang terkonsentrasi di beberapa titik, seperti Bundaran HI dan Parkir Timur Senayan, dengan sasaran utama adalah Gedung MPR/ DPR, Jalan Gatot Subroto dan Istana Negara (Istana Kepresidenan). Para demonstran tersebut pada umumnya datang dari sejumlah kawasan industri di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang tergabung dalam berbagai serikat atau organisasi buruh. Hari buruh tanggal 1 Mei tahun 2007, di Jakarta, ribuan buruh, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat turun ke jalan. Berbagai titik di Jakarta

dipenuhi para pengunjung rasa, seperti Kawasan Istana Merdeka, Gedung MPR-DPR-DPD, Gedung Balai Kota dan DPRD DKI, Gedung Depnaker dan Disnaker DKI, serta Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan Hari Buruh tahun 2008 yang lalu di Jakarta, lebih dari 20.000 buruh kumpul di Bundaran HI, mereka kemudian melakukan aksi *longmarch* menuju Istana Negara.

Tabel 2  
Jumlah pemogokan di Indonesia  
(Tahun 1990-April 2001)

Tahun	Pemogokan
1990	61
1991	130
1992	251
1993	185
1994	296
1995	276
1996	350
1997	234
1998	278
1999	125
2000	273
April 2001	63
Jumlah	2522

Sumber : Laporan perkembangan mogok kerja Depnaker

## Kemiskinan di Indonesia

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sudah dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945. berbagai program telah dirancang dan diaplikasikan dalam rangka pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera. Bahkan semua partai peserta pemilihan umum pada masa lalu (pemilu 2004) hingga sekarang selalu mempunyai program-program pengentasan kemiskinan dengan me-

tode yang berbeda satu dengan yang lain. Pengentasan kemiskinan sudah menjadi dasar berpijak (platform) mereka. Sekarang secara nyata, baik melalui media maupun secara langsung dapat kita dengarkan janji-janji atau program-program mereka selalu berpihak pada masyarakat kecil (wong cilik), agar mereka dapat hidup berdampingan dengan mereka yang dikategorikan kelompok menengah ke atas.

Mengacu pada informasi yang diterbitkan oleh BPS, perihal tingkat

kemiskinan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut (BPS, 2006) :

1. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%) yang berarti mengalami kenaikan sebanyak 3,95 juta orang dari tahun 2005
2. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dengan pedesaan tidak banyak mengalami perubahan, yaitu tetap sebagian besar (63,41%) penduduk miskin ada didaerah pedesaan
3. Peran komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibanding peran komoditas non-makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada bulan Maret 2006 sumbangan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,99%. Komoditas makanan yang berpengaruh besar tersebut diantaranya adalah beras gula pasir, kelapa, telur dan mie instant.
4. Telah terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama bulan Februari 2005 hingga bulan Maret 2006, yaitu kurang lebih sebanyak 56,51% penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada bulan Maret 2006, sisanya (43,49%) berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29% penduduk kelompok hampir miskin dan 2,29% penduduk tidak miskin pada bulan Februari 2005 justru jatuh menjadi kelompok penduduk miskin pada bulan maret 2006.

Tabel 3  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, pada Februari 2005 hingga Maret 2006.

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non-makanan	Total		
<b>Perkotaan</b>					
Februari 2005	103.992	46.807	150.799	12.40	11.37
Maret 2006	126.527	48.797	175.324	14.29	13.36
<b>Pedesaan</b>					
Februari 2005	84.014	33.245	117.259	22.70	19.51
Maret 2006	103.180	28.076	131.256	24.76	21.90
<b>Kota+Desa</b>					
Februari 2005	91.072	38.036	129.108	35.10	15.97
Maret 2006	114.619	38.228	152.847	39.05	17.75

Sumber: BPS diolah

Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk kurang lebih mencapai 210 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar tersebut dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila mereka mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi dan handal. Namun sebaliknya, jumlah penduduk yang sangat besar tersebut justru dapat menjadi beban pemerintah jika kualitasnya rendah dan tidak produktif. Keadaan seperti ini seringkali merupakan penyebab rendahnya tingkat pendapatan perkapita maupun pendapatan nasional.

Krisis ekonomi global tentu saja menambah runyamnya situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terpuruknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, upah yang kurang layak mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat, banyak industri yang terpaksa harus melakukan PHK terhadap karyawan atau buruhnya dan bahkan ada yang gulung tikar, meningkatnya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan sebagai akibat dari mahalnya biaya pendidikan (khususnya pendidikan tinggi) yang semua itu akan berakibat pada semakin bertambah beratnya beban pemerintah. Seperti yang aransir oleh Primartantyo (2009), Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi telah mengklaim bahwa kalangan pengusaha swasta sudah kesulitan dalam menghadapi dampak krisis global, akibatnya swasta tidak lagi sanggup untuk menggerakkan roda perekonomian dan terpaksa melakukan PHK terhadap 100 ribu karyawan yang terdiri dari *outsourcing*, kontrak dan tenaga kerja

harian.

Sudah barang tentu, situasi yang demikian ini akan menambah deretan angka kemiskinan. Sesuai informasi yang diperoleh, menyatakan bahwa paling sedikit 23,63 juta penduduk Indonesia terancam kelaparan, dan ancaman ini akan semakin terjadi pada masyarakat yang pengeluaran per-kapitanya kurang dari Rp 30.000,- perbulan. Dari sejumlah masyarakat yang terancam kelaparan itu, diperkirakan sebanyak 272.198 orang yang berada pada posisi sangat mengkhawatirkan.

## Keluar Dari keme- lut Perburuhan dan Kemiskinan

Sesuai dengan semangat Indonesia Bersatu, paradigma pembangunan dan pengentasan kemiskinan perlu direformasi. Berkaitan dengan perburuhan, terdapat tiga aspek yang penting untuk dilakukan, yaitu :

1. Pandangan tentang manusia dan kerja. Paradigma lama harus diubah. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, marilah kita gali kembali nilai-nilai Islam yang menyangkut masalah duniakerja untuk memperoleh inspirasi paradigma baru yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam Islam dikenal dengan hukum-hukum kontrak kerja (*Al Ijarah*), yaitu suatu transaksi (*aqad/kontrak*) atas jasa atau manfaat tertentu dengan kompensasi atau upah. Hal itu dapat terlaksana dengan baik apabila orang-orang yang melakukan kontrak kerja tersebut dinyatakan "layak", artinya yang pertama, ada kerelaan (*ke-ridlo-an*) dari kedua belah pihak yang mengikat kontrak tersebut. Kedua bahwa kedua belah pihak benar-benar berakal sehat dan mempunyai kemampuan untuk membedakan dan memilih. Ketiga ada kejelasan upah dan manfaat yang didapat.

2. Hubungan antara perwujudan kerja dengan upah. Pada hakekatnya manusia itu hidup untuk mengemban amanat ilahiyah yaitu membangun dunia untuk mencapai kesempurnaan dengan menggunakan tenaga dan pikirannya sebagai modal dasar yang paling utama. Sudah semestinya manusia sebagai ciptaan Allah tidak dinilai lebih rendah dari kapital atau faktor produksi. Pemikiran yang keliru ini harus diluruskan dengan cara pandang baru, bahwa manusia yang bekerja (buruh) hendaknya dikembalikan pada fitrahnya secara

proporsional, terutama dalam proses produksi. Dalam hal ini Islam banyak memberikan panduan.

3. Hak dasar buruh. Banyak ceritera mengenai buruh, dan pada umumnya selalu memilkan, meskipun perjuangan mereka tak kunjung berhenti. Pemogokan atau demonstrasi yang bagi buruh dianggap sebagai senjata pamungkas untuk memenangkan tuntutan mereka kepada perusahaan tak kunjung berhenti, namun nasib mereka tetap saja dalam kondisi miskin. Ironisnya buruh yang jumlahnya sangat banyak justru lepas dari perlindungan ormas atau parpol termasuk Islam, padahal mayoritas buruh beragama Islam. Hak-hak dasar seperti kesejahteraan fisik, psikis dan mental, hak berorganisasi, hak memperoleh perlindungan dan keamanan dan kesehatan kerja maupun tindakan eksploitatif lainnya masih belum optimal diberikan kepada buruh. Banyak ajaran Islam yang dapat dijadikan dasar berpijak untuk membuat pandangan dasar mengenai hak buruh.

Mereka yang berstatus korban PHK sudah sedemikian banyak, mereka harus tetap dapat bertahan hidup layak seperti masyarakat yang lain. Buruh dari industri padat karya umumnya datang dari daerah (desa), dan mereka telah kehilangan lahan dan bahkan ketrampilan. Upah yang rendah menyebabkan mereka tidak menabung secara cukup, sehingga ketika mereka kena PHK hanya mempunyai uang pesangon dari perusahaan. Sementara bagi perusahaan yang belum mampu membayar pesangon kepada buruhnya yang di PHK statusnya dihitang. Kepada mereka itu, pemerintah harus ikut campur tangan, diantaranya



foto: www.geocities.com

memberikan semangat dan motivasi untuk terus survive yang disertai bekal ketrampilan

sesuai peminatan mereka. Tidak hanya sampai disitu, mereka masih perlu pendampingan, akses dengan

pasar agar tidak hanya dapat membuat tetapi tidak mampu menjual. Yang paling penting adalah menuntun kearah kemandirian agar tidak menggantungkan diri kepada pemerintah saja.

Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi jumlah karyawan (buruh) yang kena PHK, salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi sebesar Rp 73 triliun yang rencananya akan dikucurkan bulan April 2009. Namun demikian, PHK terus akan terjadi, apalagi pada perusahaan asing padat karyawan, karena para pengusahanya mempunyai mental kapitalistik. Tentu bertolak belakang dengan harapan para buruh, bagi mereka kesejahteraan adalah tujuan. Pengangguran pada umumnya terjadi karena terjadinya ketidak seimbangan antara tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan kerja atau penyediaan pasar tenaga kerja, tetapi yang lebih banyak muncul adalah pengangguran karena adanya PHK, karena PHK akan menambah jumlah pencari kerja sementara jumlah pasar tenaga justru menurun. PHK merupakan isu yang sangat sensitive karena memiliki implikasi serius bagi para karyawan yang di-PHK. Mereka tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga

perlu diberikan pesangon untuk menyambung hidup sambil berjuang mendapatkan pekerjaan baru. Repotnya, niat mulia ini tidak selalu berjalan mulus. Posisi karyawan yang di-PHK sangat bertolak belakang dengan perusahaan. Karyawan berupaya keras memperjuangkan hak-haknya, namun di sisi berseberangan perusahaan berusaha menekan beban keuangan yang harus dibayarkan.

Meningkatnya jumlah PHK akan meningkatkan pula tingkat pengangguran. Pada akhirnya dampak dari pengangguran ini adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin (pada bulan maret 2006 yang lalu saja diperkirakan sebanyak 39,05 juta).

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, namun hemat saya paradigmanya harus direformasi juga. Selama ini Pemerintah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan, yang fokusnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, seperti pembagian beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Cara seperti itu nampaknya kurang mampu untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada, karena sifat dari bantuan tersebut tidaklah untuk program pemberdayaan, bahkan sangat memungkinkan menimbulkan penyakit ketergantungan bagi masyarakat (yang bukan golongan miskin saja termotivasi untuk mendapatkan bantuan tersebut, artinya mereka rela dianggap miskin). Program bantuan semacam itu dapat juga menimbulkan peluang adanya korupsi pada proses penyalurannya, kita lihat bagaimana ricuhnya

pembagian BLT, bantuan perbaikan rumah karena gempa dan sekarang ada lagi bantuan untuk korban danau Situ Gintung. Itu tidak salah, tetapi benar-benar bahwa bantuan itu semata-mata hanya untuk pertolongan jangka pendek saja.

Program pengentasan kemiskinan jangka panjang seharusnya diarahkan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dengan pola kerja yang bebas dengan "ketergantungan". Misalnya, bantuan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas SDM, melalui program pendidikan dan latihan serta kesehatan. India, telah menggunakan Teknologi Informasi (IT) agar masyarakat miskin yang tinggal dipedesaan dapat berkomunikasi dengan para dokter spesialis di kota atau dirumah sakit yang berkualitas. BOS merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, sayangnya yang menikmati BOS tersebut tidak hanya masyarakat miskin saja, tetapi juga masyarakat yang mampu. Meskipun sulit, mesti dicari jalan keluarnya agar ketimpangan itu dapat diminimais.

Faktor lain yang seharusnya diperhatikan adalah penyebab munculnya kemiskinan. Mungkin saja PHK bukanlah penyebab utama munculnya kemiskinan, tetapi justru mental tidak mau kerja keras, mental gengsi untuk bekerja yang rendah, mental menunggu pembagian. Setiap daerah atau wilayah mungkin saja berbeda penyebabnya, inilah kesulitan yang muncul apabila akan dilakukan pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi apabila ada dua atau lebih lembaga yang memberikan data yang berbeda mengenai jumlah PHK, pengangguran dan kemiskinan. Data mana yang akan dipakai? Yang paling mengkhawatirkan apabila besarnya dana alokasi untuk bantuan didasarkan pada angka yang paling rendah. Ini pasti akan menimbulkan gejala di masyarakat.

### Penutup

Sejak tahun 2001, otonomi daerah telah dijalankan, maka diharapkan pemerintah daerah setempat (lokal) mampu menganalisis, menyaring informasi mana yang harus dikembangkan sebagai dasar pengambilan keputusan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah lokal. Ketenagakerjaan dan kemiskinan tidak dapat dilihat dari satu dimensi saja, melainkan memerlukan diagnosis dan analisis yang menyeluruh, lengkap dari semua aspek yang menjadi penyebab kemiskinan.

Dari para penyedia informasi, diharapkan ada kesamaan informasi yang akurat dan valid agar dapat dilakukan program-program yang tepat untuk pencapaian tujuan, baik dilevel nasional, kabupaten maupun di tingkat perdesaan.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun kemiskinan serta akibat yang dapat muncul. Indikator-indikator yang nyata (faktual) sangat penting artinya bagi penyusunan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu setiap pemerintah kabupaten/kota hendaknya melakukan kerjasama dengan pendidikan tinggi untuk melakukan penelitian yang lebih tepat yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing kabupaten/kota (peneliti yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu/multi disiplin)